

HUKUM TATA NEGARA

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD MUNIF

NPM : 2174201001554

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

HUKUM TATA NEGARA

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD MUNIF
NPM : 2174201001554**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 12 Juli 2025



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

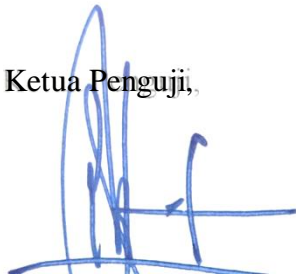
Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUHAMMAD MUNIF
NPM : 2174201001554

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 12 Juli 2025

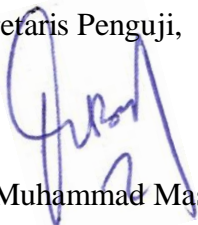
Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.



Anggota Dewan Penguji,



Yudhia Ismail., S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 12 Juli 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

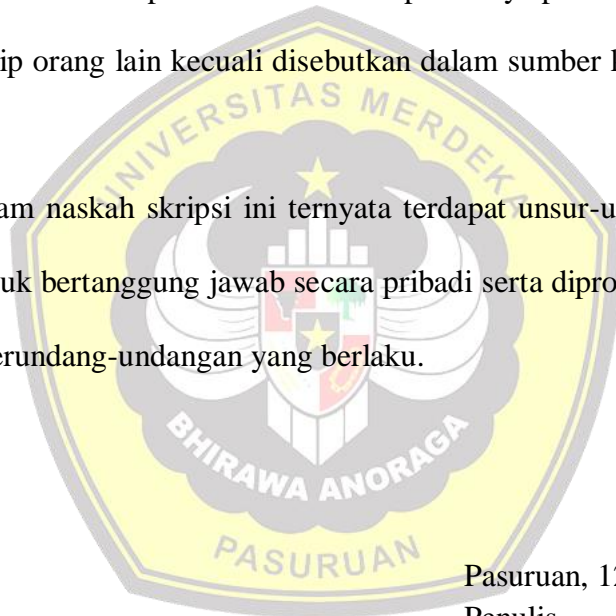
Rancangan perubahan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tatib yang dilakukan DPR menimbulkan ketidakpastian hukum yang membahayakan. Revisi tata tertib DPR mengatur bahwa DPR akan memiliki kewenangan baru untuk menilai bahkan memberhentikan pimpinan lembaga yang sebelumnya telah menjalani uji kelayakan di DPR seperti Polri, TNI, KPK dan sejenisnya. Peraturan tata tertib DPR hanyalah peraturan internal yang mengatur mekanisme kerja DPR sendiri, bukan peraturan lembaga negara lainnya. Apabila peraturan internal tersebut melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang lain dan/atau Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan di atasnya justru menimbulkan kerancuan hukum dan penalaran yang sewenang-wenang. Upaya DPR untuk memperluas kewenangannya melalui peraturan internal menuai resistensi dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat maupun lembaga yang terkait langsung. Uji materiil (*judicial review*) perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap revisi peraturan tata tertib tersebut apakah sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku atau justru bertentangan dengan peraturan lain yang kedudukannya berada di atas peraturan DPR. Penulis merumuskan masalah penelitian ini ke dalam 2 (dua) masalah yaitu bagaimana kedudukan hukum tata tertib DPR RI dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan apakah Mahkamah Agung berwenang melakukan *judicial review* terhadap tata tertib DPR RI. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif yang fokus pada data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum tata tertib DPR RI bukan termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah wewenang Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Peraturan DPR, hierarki peraturan perundang-undangan, *judicial review*.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasuruan, 12 Juli 2025

Penulis,



MUHAMMAD MUNIF
NPM : 2174201001554

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISA YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN”** tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan yang menyebabkan skripsi ini masih jauh dari harapan dan kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyowati, M. P;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus dosen pembimbing II yang juga memotivasi dan memberikann semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dan telaten serta membagi waktunya dengan sukarela di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku dosen penguji yang turut membantu

memberikan arahan, saran dan masukan positif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan segenap ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
6. Keluarga penulis tercinta yang tiada henti memberikan do'a dan motivasi bagi penulis serta memberikan tempat ternyaman dan hangat di rumah, semoga penulis bisa membanggakan keluarga.
7. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi bagi seluruh pembaca.

Pasuruan, 12 Juli 2025
Penulis,

MUHAMMAD MUNIF
NPM : 2174201001554

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia	
1. Pengertian dan Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia	14
2. Kedudukan dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia	17
3. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia	19

4. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Tata Tertib Dewan	
1. Pengertian Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>)	23
2. Syarat-Syarat <i>Legal Standing</i> dan Hak Kewajiban ...	25
3. Tujuan dan Fungsi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia	28
4. Pengaturan di dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia	30
C. Tinjauan Umum Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	
1. Teori Norma Hukum di Indonesia	34
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	36
3. Struktur Peraturan Perundang-Undangan dan Struktur Lembaga	43
4. Landasan Pembentukan Undang-Undang	46

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian	51
B. Ruang Lingkup Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	55

	E. Teknik Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV	: ANALISA YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	
	A. Kedudukan Hukum Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	57
	B. Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan <i>Judicial Review</i> Terhadap Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	61
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

